

Komunikasi Politik GAM-RI pada Perundingan Helsinki

Reza Maulana

Universitas Syiah Kuala

Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh – Indonesia

Email: reza.remoll@gmail.com, Phone +62 21 7656971

How to Cite This Article: Maulana, R. (2018). Komunikasi Politik GAM-RI pada Perundingan Helsinki. *Jurnal Studi Komunikasi*, 2(3). doi: 10.25139/jsk.v2i3.1096

Received: 16-08-2018,
Revision: 04-10-2018,
Acceptance: 12-10-2018,
Published online: 01-11-2018

English Title: *Political Communication between Free Aceh Movement and Indonesia in the Helsinki Negotiation*

Abstract *This study purposes to find out how political communication that occurs between GAM-RI negotiation in Helsinki on 2005. Helsinki negotiation is a phenomenon of political communication which is reached an agreement. The theory used is empathy and homophile. The research method uses a qualitative approach with descriptive research. Data collection tools in this study of semi-structured interviews and documentation study. Informant selection technique used is purposive technique. Based on the results of data processing in an interactive, results are obtained that negotiation built through six stages: preparation; The first contact; confrontation; conciliation; solutions; and post-negotiation. In the negotiations the two sides have similarities that can make both sides mutual trust and the creation of an effective political communication. The similarities among ethnic and organizational background. Effective use of empathy and homophile greatly affect the process and outcome of the negotiations.*

Keywords: *political communication; aceh; negotiation; empathy and homophile; peace*

Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi politik yang terjadi antara GAM-RI pada perundingan di Helsinki Tahun 2005. Perundingan Helsinki merupakan fenomena komunikasi politik yang berujung pada sebuah kesepakatan damai. Teori yang digunakan adalah Teori Empati dan Homofili. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Alat pengumpulan data pada penelitian ini berupa wawancara semi terstruktur dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah teknik purposif. Berdasarkan hasil pengolahan data secara interaktif, diperoleh hasil bahwasanya negosiasi dibangun melalui enam tahapan, yaitu: persiapan; kontak pertama; konfrontasi; konsiliasi; solusi; dan pasca negosiasi. Dalam bernegosiasi kedua belah pihak memiliki kesamaan-kesamaan yang dapat membuat kedua belah pihak saling mempercayai dan terciptanya sebuah komunikasi politik yang efektif. Kesamaan

tersebut diantaranya kemiripan etnis dan latar belakang organisasi. Efektifitas penggunaan empati dan homofili sangat mempengaruhi proses dan hasil negosiasi.

Kata Kunci: komunikasi politik; aceh; negosiasi; empati dan homofili; perdamaian

PENGANTAR

Artikel ini mencoba membahas secara ilmiah sebuah proses komunikasi politik pada sebuah perundingan yang menghasilkan perdamaian. Konflik tersebut terjadi antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang merupakan sebuah organisasi politik yang menuntut kemerdekaan dari Pemerintah Indonesia. Konflik bersenjata ini terjadi selama puluhan tahun. Beberapa rezim Pemerintah Indonesia berganti, namun tidak pernah bisa menyelesaikan konflik ini, sampai pada akhirnya pada tahun 2005 sebuah kesepakatan damai ditandatangani, tentu saja ini merupakan pertanda dari berakhirnya konflik tersebut.

Peristiwa ini menjadi sejarah penting bagi rakyat Aceh dan Indonesia secara khusus dan bagi perdamaian dunia secara umum. Berakhirnya konflik bersenjata ini harus disambut baik dalam sistem peradaban modern yang mengedepankan perdamaian dan kerukunan global. Secara ilmiah, peristiwa ini terlibat dalam banyak disiplin ilmu sosial, salah satunya komunikasi. Dalam terminologi komunikasi, proses terciptanya perdamaian pada Agustus 2005 termasuk dalam kajian komunikasi politik. Aktor-aktor yang terlibat, tuntutan dari kedua belah pihak yang berkonflik, hingga dengan hasil yang didapatkan dalam perundingan ini semuanya merupakan aktor dan aktivitas politik. Sehingga, fenomena ini bisa disebut juga proses komunikasi politik, khususnya dibidang perundingan untuk perdamaian, yang berhasil mencapai hasil yang maksimal, yaitu kesepakatan damai. Proses dan hasil perundingan tersebut kemudian menjadi sangat tertarik untuk diteliti secara ilmiah melalui perspektif ilmu komunikasi.

GAM merupakan sebuah gerakan politik bersenjata yang lahir di Aceh. Semenjak dideklarasikanya Gerakan Aceh Merdeka pada 4 Desember 1976 oleh sang pelopor Teungku Hasan Muhammad di Tiro, GAM terus berkembang menjadi sebuah gerakan perlawanan yang bersenjata untuk

menuntut kemerdekaan dari Republik Indonesia (Al-Chaidar, 1999).

Namun pada tanggal 15 Agustus 2005, disepakatilah sebuah perjanjian damai, perjanjian yang dilakukan oleh pihak GAM dan Republik Indonesia (RI) yang difasilitasi oleh *Crisis Management Initiative* (CMI) di Helsinki, Finlandia. Peristiwa ini kemudian disebut dengan MoU Helsinki. Perjanjian tersebut menandai sebuah era baru bagi Aceh dan Indonesia, yaitu era damai.

Konflik bersenjata, tragedi kemanusiaan, serta sederet peristiwa yang berimbas dari konflik tersebut ternyata juga bisa diselesaikan melalui sebuah pendekatan yang humanistik dan damai. Sebuah perundingan yang dilakukan melalui beberapa tahap, sampai akhirnya mencapai sebuah perjanjian damai yang bermartabat bagi kedua belah pihak yang berkonflik (Situmorang, 2010).

Sebenarnya perundingan yang terjadi antara GAM-RI di Helsinki bukanlah perundingan pertama yang terjadi. Sebelumnya pernah terjadi perundingan damai yang difasilitasi oleh Herry Dunant Center (HDC). Perundingan ini menghasilkan *Humanitarian Paused* (jeda kemanusiaan) yang ditandatangani di Bavois, 12 Mei 2000. Beberapa saat kemudian situasi kembali memanas, jeda kemanusiaan dilanggar, konflik kembali terjadi (Djumala, 2013).

HDC kemudian mencoba memfasilitasi perundingan untuk meredakan konflik. Kedua belah pihak sepakat untuk memulai kembali perundingan. Pada 12 Desember 2002, disepakatilah *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA). Sama seperti sebelumnya, hanya dalam waktu beberapa bulan, pada 19 Mei 2003 Presiden megawati menandatangani penetapan Darurat Militer (DM) di Aceh, yang menjadi penanda bahwasanya CoHA telah gagal mendamaikan konflik Aceh (Djumala, 2013).

Pada tahun 2003 perundingan kembali digagas, kali ini Jepang menjadi tuan rumah diadakannya perundingan, Perundingan ini dilaksanakan di Tokyo, oleh karena itu perundingan ini disebut perundingan Tokyo. Karena tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan Tokyo gagal tanpa menghasilkan apapun.

Beberapa perundingan yang peneliti sebutkan diatas selalu gagal. Berbeda dengan perundingan yang terjadi di Helsinki pada tahun 2005, perundingan Helsinki mencapai sebuah kesepakatan damai dan perdamaian masih terus terjaga sampai dengan hari ini. Keberhasilan perundingan Helsinki menjadi menarik untuk diteliti, apa yang membedakan keberhasilan perundingan ini dengan kegagalan perundingan-perundingan sebelumnya.

Kemudian dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dilakukan perundingan damai di Helsinki. Setelah melalui lima tahapan perundingan, barulah pada tanggal 15 Agustus 2005 disepakati sebuah perjanjian dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) yang sampai hari ini dikenal sebagai MoU Helsinki.

Dalam proses perundingan melalui negosiasi Helsinki tersebut tentulah dilakukan dengan langkah-langkah yang lebih *soft* dan mengedepankan kesamaan dan solusi untuk pemecahan konflik. Hal tersebut yang membedakan perundingan Helsinki dengan perundingan-perundingan sebelumnya yang pernah dilakukan. Juru runding dari masing-masing pihak yang berkonflik juga berbeda. Sehingga perundingan Helsinki 2005 lebih mudah dilakukan dan menghasilkan kesepakatan bersama yang bermartabat.

Salah satu strategi penyelesaian konflik secara bermartabat ialah melalui jalur perundingan dan negosiasi. Melalui sebuah komunikasi yang baik dan efektif maka peluang terjadinya penyelesaian konflik semakin besar. Seperti yang dikatakan oleh Simon Fisher, salah satu strategi komunikasi yang penting untuk dilakukan dalam menyelesaikan konflik adalah menciptakan suasana komunikasi yang terbuka dan jujur (Fisher, 2001). Menurut A. Muis dalam pendekatan penyelesaian konflik melalui perundingan dan negosiasi tentulah kemampuan komunikasi menjadi sebuah senjata yang sangat penting. Pasalnya dalam setiap proses negosiasi, para juru runding mengirimkan pesan-pesan politik yang kemudian secara bersama-sama disepakati (Arifin, 2003).

Dalam proses negosiasi, seorang negosiator harus mampu menyampaikan maksud pesan dengan baik, agar komunikan mampu menangkap maksud yang ingin disampaikan. Setelah kedua belah pihak memahami dengan baik pesan yang ingin disampaikan, barulah komunikan kemudian memberikan respon. Disinilah sebenarnya proses negosiasi berjalan. Proses ini digambarkan melalui sebuah model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Laswell yaitu *who* (siapa), *say what* (pesan), *in what channel* (medium), *to whom* (kepada siapa), *with what effect* (umpan balik). Maka dapat kita artikan bahwasanya dalam melakukan negosiasi, kemampuan memahami maksud pesan yang disampaikan oleh masing-masing negosiator sangatlah penting (Mulyana, 2000).

Disamping menyampaikan pesan politik yang dilakukan saat perundingan, para juru runding harus menemukan persamaan-persamaan, sehingga negosiasi yang berlangsung bisa lebih mudah diterima oleh kedua belah pihak. Persamaan tersebut bisa dalam pendekatan apa saja seperti politik, budaya, agama, dan dapat pula disampaikan secara lisan maupun simbol-simbol (Arifin, 2003).

Peneliti menemukan beberapa temuan penting pada proses prundingan. Pertama, Kesepakatan-kesepakatan negosiasi yang membahas poin-poin yang bersifat krusial seperti terminologi status Aceh dalam Indonesia dan pembentukan partai politi lokal. Kesepakatan dalam pembahasan poi-poin ini justru terjadi diluar meja perundingan (non-formal) dengan pendekatan homofili, yaitu komunikasi antara tim juru runding GAM dengan Sofyan Djalil yang mewakili juru runding Indonesia yang notabenenya adalah orang Aceh.

Kedua, empat dari lima juru runding Indonesia, yaitu Hamid Awaluddin, Farid Husain, Sofyan Djalil, dan Gusti Agung Wesaka Puja tidak berasal dari Pulau Jawa. Kebencian GAM terhadap Indonesia yang dimanifestasikan dalam bentuk etnis Jawa benar-benar dipahami oleh tim perunding Indonesia. Hamid Awaluddin dan Farid Husain berasal dari Makassar, Sofyan Djalil berasal dari Aceh, dan Gusti Agung Wesaka Puja berasal dari Bali. Hubungan antara Aceh dan

Bugis dan Bali menumbuhkan kepercayaan bagi pihak GAM. GAM percaya bahwa perkataan orang Bugis dan Bali bisa dipercaya karena dari dulu nenek moyang kita memiliki karakteristik yang sama dengan mereka. Kepercayaan tersebut menjadi modal besar untuk melanjutkan tahapan perundingan (Husain, 2007).

Ketiga, Negara yang dipilih untuk dilaksanakannya perundingan adalah Finlandia. Para petinggi GAM sangat menghargai dan menghormati integritas dari negara-negara Skandinavia. Indonesia juga menganggap bahwa Finlandia adalah negara yang paling tepat untuk dijadikan lokasi perundingan. Terutama dengan difasilitasi oleh Mantan Presiden Finlandia, Marti Ahtisaari.

Keempat, bencana alam gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh pada 26 Desember 2004 menjadi momentum percepatan perdamaian Aceh. Momen ini mendesak kedua belah pihak untuk memprioritaskan perhatian pada korban bencana alam dan upaya membangun kembali Aceh yang luluh-lantak akibat bencana. Sehingga, baik GAM maupun Indonesia harus sama-sama memusatkan empatinya terhadap korban bencana yang sangat mendesak membutuhkan bantuan.

Kelima, kemauan yang kuat dan pendekatan emosional sangat mempengaruhi jalanya perundingan. Meski banyak dari Pemerintahan Indonesia, baik eksekutif, legislatif, maupun militer menentang jalanya perundingan, kemauan dan keberanian yang kuat dari kedua belah pihak untuk tetap melanjutkan perundingan sangatlah penting.

Sebagai putra daerah yang turut merasakan dampak dari konflik tersebut, peneliti termotivasi untuk meneliti secara ilmiah keberhasilan perundingan Helsinki. Keberhasilan ini bisa dijadikan sebagai sebuah model komunikasi politik pada perundingan untuk menyelesaikan konflik. Hasil penelitian ini bisa kemudian ditujukan untuk menjadi acuan pembelajaran, baik akademis maupun praktis, tentang komunikasi politik antara GAM - RI pada perundingan Helsinki.

Fenomena ini telah diteliti oleh banyak peneliti, baik di Aceh maupun dari dunia internasional. Namun, penelitian

melalui kajian ilmu komunikasi, khususnya komunikasi politik belum pernah dilakukan sebelumnya. Fakta ini menjadi tantangan dan semangat tersendiri bagi peneliti untuk melakukan kajian dalam perspektif ilmu komunikasi.

Karya ilmiah ini ditulis dengan menggunakan perangkat metodologi ilmiah sesuai dengan metodologi kajian sosial, khususnya ilmu komunikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Meleong, menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Kasiram, 2008). Jenis penelitian ini berupa deskriptif. Penelitian deskripsi adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Kountur, 2009).

Informan yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini ditentukan secara ketat. Informan penelitian ini meliputi beberapa macam, seperti, informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, informan utama yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, informan tambahan yaitu mereka yang memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti (Suyanto, 2007). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penarikan sampel purposif sampel non-probabilitas. Sampel purposif adalah orang-orang yang diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat berdasarkan tujuan riset (Kriyantono, 2006). Adapun kriteria informan tersebut ialah sebagai berikut: 1) Ketua tim perunding GAM. 2) Pimpinan juru runding GAM. 3) Juru runding GAM yang paling banyak berbicara pada saat perundingan. 4) Ketua tim perunding Indonesia. 5) Perunding Indonesia yang terlibat dari awal perencanaan perundingan sampai dengan pasca perundingan.

Tabel 1. Daftar Informan Yang Diwawancarai

No.	Nama Informan	Peran Saat Perundingan	Keterangan
1.	Malik Mahmud Al-Haytar	Perdana Menteri GAM	Wawancara
2.	Zaini Abdullah	Mentri Luar Negeri GAM	Wawancara
3.	Nur Djuli	Juru Runding GAM	Wawancara

Tabel 2. Daftar Informan dengan Studi Kepustakaan

No.	Nama Informan (Penulis)	Judul Buku	Peran Saat Perundingan
1.	Hamid Awaludin	Damai di Aceh	Ketua Tim Runding Indonesia
2.	Farid Husain	<i>To See The Unseen</i>	Tim Perunding Indonesia

Untuk mengumpulkan data dari para informan yang telah ditentukan peneliti menentukan dua metode pengumpulan data. Kedua metode tersebut adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara adalah percakapan antara periset, yaitu orang yang mengharapkan informasi dengan informan, yaitu orang yang diasumsikan memiliki informasi (Berger, 2000). Wawancara ini dilakukan pada informan yang mampu diakses oleh peneliti. Selanjutnya metode dokumentasi. Metode dokumentasi bertujuan untuk menggali data-data masa lampau sebagai instrumen atau data penelitian. Metode dokumentasi biasanya digunakan untuk penelitian yang bersifat historis. Menurut Kriyantono, dokumen-dokumen yang diteliti bisa berbentuk dokumen publik dan dokumen privat. Metode ini

digunakan karena ketidakmampuan peneliti menjumpai informan secara langsung. Namun peneliti membaca buku yang ditulis langsung oleh informan terkait dengan tujuan penelitian yang juga atas rekomendasi informan.

Menurut model analisis Interaktif Miles dan Huberman bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dimana terdapat tiga tahap dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Rambe, 2015).

Peneliti membatasi penelitian ini hanya pada proses perundingan Helsinki. Tepatnya dimulai dari tahapan penjajakan dan pengumpulan informasi yang dilakukan oleh Farid Husain sebagai staf ahli Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) pada waktu itu sampai dengan penandatanganan MoU Helsinki.

Untuk memperkuat penelitian ini, penelitian merujuk kepada dua tinjauan literasi yang juga merupakan skripsi yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu: 1) Peran *Crisis Management Initiative* (CMI) dalam Menangani Konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). 2) Upaya Penyelesaian Konflik Aceh Melalui Proses Pendekatan Resolusi Konflik (Sebuah Studi Analisis Tentang Penyelesaian Konflik Aceh dalam Rentang Waktu Tahun 2000-2005)

DISKUSI

Bermulanya Negosiasi dan Perundingan

Pada bulan Mei Tahun 2003, tepatnya beberapa hari setelah gagalnya perundingan antara GAM dan RI di Tokyo, Jepang yang difasilitasi oleh Henri Dunant Center (HDC). Pemerintah Indonesia khususnya Bapak Jusuf Kalla yang waktu itu menjabat sebagai Menko Kesra menginisiasikan perundingan kembali antara GAM dan RI. Pada awalnya perundingan itu di inisiasikan langsung oleh Jusuf Kalla setelah keberhasilannya membuat perdamaian bagi konflik di Poso dan Ambon.

Jusuf Kalla yang menginisiasikan perundingan menugaskan salah satu deputinya, yaitu Farid Husain untuk mencoba membangun hubungan kembali dengan pihak GAM secara informal agar mampu berunding kembali. Upaya tersebut kemudian dilakukan oleh Farid Husain yang diawali dengan makan di siang di warung nasi khas Aceh. dalam proses ini Farid Husain selain mencari akses untuk bisa bertemu dengan petinggi GAM, ini merupakan upaya untuk mengenal lebih dekat, bagaimana sebenarnya orang Aceh, bahkan mulai dari masakan khas Aceh. Dengan kata lain upaya untuk menempatkan diri menjadi orang Aceh.

Saat itu Farid Husain mengeluarkan kemampuan komunikasi politiknya untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang yang paling berpengaruh di GAM, bagaimana sistem komunikasi dan sistem komando GAM, seberapa berperankah diaspora dan militer yang dilapangan terhadap keputusan perundingan, dan lain sebagainya. Untuk dapat mengetahui hal-hal tersebut, sudah menjadi barang tentu Farid Husain penting untuk menemui banyak sekali orang Aceh. Dalam setiap pertemuannya, Farid hanya mendengar keluhan dan ungkapan kemarahan mereka terhadap Indonesia tanpa melakukan konfrontasi kembali. Meski beberapa ucapan pernah menyinggung perasaan Farid. Upaya mendengarkan ternyata sangat efektif untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak GAM. Kemampuan merasakan inilah salah satu wujud dari upaya menempatkan diri pada orang lain.

Pada sisi yang lain, GAM juga sudah menyadari bahwasanya setelah kegagalan pada perundingan tokyo akan diadakan lagi perundingan-perundingan berikutnya, namun siapa yang menjadi fasilitator, dimana tempatnya, dan seperti apa formatnya masih belum dibicarakan. Pada awalnya GAM para petinggi GAM yang ada di luar negeri sangat tertutup terhadap pihak Pemerintah. Hal ini terjadi karena krisis kepercayaan yang dirasakan oleh GAM. Namun, Juha Christensen yang bekerja pada CMI yang kemudian diketahui sebagai fasilitator perundingan Helsinki menjadi perantara yang sangat efektif antara kedua belah pihak. Kepercayaan yang terbangun antara Juha, Farid, dan Malik Mahmud sebagai petinggi GAM kemudian berhasil mencapai

sebuah kesepakatan untuk kembali berunding di Helsinki dengan CMI sebagai fasilitator.

Inisiatif fasilitator justru muncul dari CMI sendiri. Pada suatu hari di Bulan Desember 2003, Juha Cristensen menjumpai Farid Husain di kantornya. Juha menawarkan diri untuk menjadi fasilitator dalam upaya penyelesaian konflik Aceh. Inisiatif tersebut disambut dengan sangat baik oleh Farid Husain. sejak saat itu Juha berkomunikasi intens dengan pihak pemerintah mencari cara agar bisa berunding kembali dengan pihak GAM. Sampai kemudian Juha Cristensen berhasil mempertemukan Farid Husain dan Marti Ahtisaari.

Pada saat yang bersamaan Juga menawarkan hal yang sama kepada para petinggi GAM yang berada di Swedia. GAM terbuka saja untuk memulai kembali perundingan, namun dengan beberapa catatan penting agar GAM tidak kembali dicurangi seperti pengalaman yang sudah-sudah.

Komunikasi politik yang dibangun antara GAM dan RI pada saat penginisiasian tidak pernah dilakukan secara langsung. Juha-lah yang memiliki peranan penting untuk mempertemukan pandangan dari kedua belah pihak agar mau berunding kembali. Kepiawaian Juha adalah kemampuan komunikasi untuk meyakinkan kedua belah pihak. Fase ini merupakan fase penentu apakah perundingan akan dilakukan atau tidak. Selain Juha, Mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari yang juga chairman of CMI memainkan peranya dengan sangat baik. Sehingga kerangka perundingan yang ditawarkanya diterima oleh kedua belah pihak.

Faktor lain yang turut berperan adalah peristiwa besar yang terjadi pada Desember 2004, yaitu bencana tsunami di Aceh. bencana tersebut mendorong masyarakat internasional untuk mengulurkan bantuan bagi para korban tsunami di Aceh. namun bantuan-bantuan tersebut terkendala dengan status Aceh sebagai daerah konflik. Sehingga bantuan tidak bisa disalurkan dengan lancar. Kondisi ini mendesak kedua belah pihak, yaitu GAM dan RI untuk segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik Aceh.

Setelah GAM dan RI setuju untuk memulai perundingan, tahap berikutnya adalah menunggu surat undangan dari fasilitator dan jadwal perundingan yang disiapkan. Kemudian Marti Ahtisaari mengirimkan undangan kepada kedua belah pihak untuk memulai perundingan tahap pertama, yaitu pada tanggal 27-29 Januari 2015.

Perundingan Helsinki dilakukan selama lima kali putaran ditambah dengan satu kali penandatanganan. Perundingan dilakukan di sebuah Mansion tua milik Pemerintah Finlandia di Vantaa, 25 Kilometer di luar kota Helsinki. Sedangkan penandatanganan dilakukan di Smolna, Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005.



Gambar 1 Gedung perundingan Vantaa

Sumber: Hamid Awaluddin (2008)

Masing-masing pihak yang berunding diwakili oleh sebuah tim. Jumlah anggota tim juru runding masing-masing sebanyak lima orang yang dipimpin oleh seorang ketua tim. Dari pihak GAM diketuai oleh Malik Mahmud, kemudian Zaini Abdullah, Bachtiar Abdullah, Nurdin Abdurrachma, dan Nur Djuli. Sedangkan di pihak Indonesia dipimpin oleh Hamid Awaluddin, kemudian Sofyan Djalil, Farid Husain, Usman Basya, dan Gusti Agung Wesaka Puja. Kemudian di pihak CMI sebagai fasilitator dipimpin langsung oleh mantan Presiden Finlandia Marti Ahtisaari, kemudian Hannu Himanen, Juha Christensen, dan Maria. Posisi kedua belah pihak berunding dalam sebuah ruangan persegi panjang dengan posisi meja berbentuk letter U. GAM dan RI

duduk saling berhadapan, sedangkan CMI duduk pada sisi yang lainnya.



Gambar 2 Ruang perundingan

Sumber: Hamid Awaluddin (2008)

Tabel 3. Jadwal Perundingan

No.	Putaran	Jadwal	Lokasi
1.	Pertama	27, 28, 29 Januari 2005	Vantaa, Helsinki
2.	Kedua	21, 22, 23 Februari 2005	Vantaa, Helsinki
3.	Ketiga	12, 13, 14, 15, 16 April 2005	Vantaa, Helsinki
4.	Keempat	26, 27, 28, 29, 30, 31 Mei 2005	Vantaa, Helsinki
5.	Kelima	12, 13, 14, 15, 16, 17 Juli 2005	Vantaa, Helsinki
6.	Tanda Tangan	15 Agustus 2005	Smolna, Helsinki

Sumber: Diolah oleh peneliti

Negosiasi, Perundingan, dan Pemaknaan akan Damai

Putaran pertama perundingan dimulai pada tanggal 28 Januari 2005. Karena sehari sebelumnya adalah waktu Ahtisaari menemui pihak GAM dan RI secara terpisah untuk membahas mekanisme perundingan. Ahtisaari membuka pertemuan dengan mengheningkan cipta bagi para korban bencana dan konflik Aceh. Kemudian Ahtisaari mempersilahkan masing-masing ketua juru runding untuk menyampaikan pidato pembukanya.

Pada putaran ini pihak Indonesia mengawali perundingan dengan melakukan empati yang diwujudkan dengan pemaparan potret Aceh pasca bencana tsunami. Empati tersebut diharapkan mampu menggugah dan dijadikan sebagai titik berangkat untuk memulai perundingan. Pihak GAM juga menyambut baik itikad kemanusiaan yang ditawarkan oleh Indonesia, namun GAM tetap berupaya membangun posisi tawar untuk menyetarakan posisi dalam bernegosiasi. Hal tersebut diwujudkan dengan dimunculkannya isu merdeka pada pidato pembukaan Malik Mahmud yang nyaris saja menggagalkan perundingan.

Dalam setiap kesempatan pada putaran pertama GAM selalu membicarakan tentang agenda kemerdekaan dan referendum, Nurdin Abdurrahman selalu membicarakan tentang pelanggaran ham yang terjadi terhadap dirinya dan kepada Rakyat Aceh. GAM menuntut untuk terlebih dahulu kedua belah pihak melakukan gencatan senjata, Gencatan senjata juga dijadikan prasyarat untuk melanjutkan perundingan. Namun pihak Indonesia yang didukung oleh Ahtisaari menolak semua prasyarat untuk melakukan perundingan. Indonesia dan Ahtisaari ingin membahas konsep perdamaian secara menyeluruh dan tidak parsial, serta siapapun tidak boleh mengajukan prasyarat untuk meneruskan perundingan. Putaran pertama perundingan berakhir dengan sebuah kesepakatan untuk tetap melanjutkan perundingan.

Putaran kedua perundingan perdebatan menjadi semakin dinamis. Pada awal-awal putaran kedua, kedua belah pihak masih belum menemukan bentuk kongkrit

terminologi dan kerangka perdamaian. Namun, keduanya sudah mulai saling tawar-menawar tentang terminologi yang digunakan, yaitu otonomi khusus (Pemerintah Indonesia) dan self-government (GAM). Tawar-menawar tersebut berlangsung alot. Dalam upaya mencari terminologi yang digunakan tersebut keduanya hampir mencapai jalan buntu (*dead lock*). Kedua belah pihak hampir saja memutuskan untuk menghentikan perundingan apabila usul mereka masing-masing tidak diakomodir. Namun disinilah kepiawaian fasilitator untuk mencari solusi dalam upaya penyelesaian konflik. Hasil ini juga menentukan perundingan berikutnya bisa terus dilakukan atau dihentikan.

Marti Ahtisaari menawarkan sebuah terminologi *self-government* dengan Indonesia. Terminologi ini disepakati oleh kedua belah pihak. Konsep yang ditawarkan Ahtisaari dianggap telah merangkul kepentingan kedua belah pihak. Dalam perdebatan ini baik GAM maupun Indonesia melakukan konfrontasi untuk mempertahankan prinsip masing-masing. Komunikasi politik yang terjadi justru perdebatan sengit. Sebagai sebuah terminologi dan konsep perdamaian, sudah menjadi barang tentu pembahasan ini sangat krusial sebagai pondasi dari perdamaian.

Kebuntuan-kebuntuan yang terjadi di meja perundingan sering sekali berhasil dipecahkan melalui komunikasi non-formal yang dilakukan disela-sela perundingan. Sering sekali Hamid Awaluddin bersama dengan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah berjalan di halaman belakang gedung perundingan untuk membicarakan solusi dari kebuntuan tersebut dari hati ke hati. Beberapa kali mereka ditemani oleh Marti Ahtisaari. Selain berjalan di halaman belakang, beberapa kali mereka mendiskusikan kebuntuan saat rehat sambil minum kopi, atau makan malam di luar agenda perundingan.

Komunikasi-komunikasi kecil tersebut bahkan sangat sering menggunakan pendekatan empati dan homofili. Seperti sapaan yang dilakukan oleh Hamid Awaluddin terhadap tokoh-tokoh GAM dengan sebutan khas Orang Aceh, yaitu teungku. Bahkan beberapa kali Mahmud mengeluarkan air mata ketika mengungkapkan kerinduannya

untuk pulang ke Aceh. Bahkan Malik pernah memohon pada Hamid Awaluddin untuk segera mengakhiri konflik tersebut.

Mengatasi Kebuntuan Komunikasi: Perundingan

Pada putaran ketiga GAM kembali membicarakan tentang referendum dan pelanggaran HAM. Namun tawaran kongkret Indonesia yang tentu saja tidak bisa ditolak oleh GAM menjadi senjata yang sangat ampuh dalam perundingan Helsinki, yaitu amnesti. Selanjutnya kedua belah pihak kembali mendiskusikan mekanisme amnesti yang akan dijalani. Amnesti acap kali menjadi pembahasan yang ampuh untuk melanggengkan perundingan. Bahkan Ahtisaari sering memotong perdebatan dengan mempersilahkan Menteri Awaludin untuk menjelaskan mekanisme amnesty dan kompensasi.

Pada putaran keempat, kondisi perundingan semakin menunjukkan kemajuan. Beberapa kali Ahtisaari meninggalkan ruang perundingan dan membiarkan pihak GAM dan RI mendiskusikan secara langsung melanjutkan perundingan. Meski hanya tinggal GAM dan RI saja di ruang perundingan, namun perundingan berlangsung cukup kondusif dan lancar. Hal ini dilakukan agar kedua belah pihak mampu melakukan komunikasi secara langsung. Ini merupakan perkembangan hubungan yang cukup baik. Kepercayaan yang dimiliki oleh kedua belah pihak membentuk sebuah hubungan yang baik, sehingga komunikasi politik yang dilakukan untuk membahas dan mencari titik temu dari masing-masing kepentingan bisa dibahas secara langsung tanpa difasilitasi.

Kemajuan ini adalah kemajuan yang baik bagi perundingan dan bagi komunikasi politik itu sendiri. Saling percaya, memahami, dan mencari solusi bersama menandakan bahwa komunikasi dan perundingan berjalan sesuai dengan harapan. Maka untuk melanjutkan dan mengembangkan pembahsan perundingan menjadi sebuah langkah pasti yang tidak terlalu berat.

Namun, ada isu baru yang muncul pada putaran keempat. Isu partai politik lokal muncul pertama sekali pada

putaran ini. Isu ini diusulkan oleh GAM, namun pihak Indonesia tidak dapat memenuhi usul yang satu ini. Meski Konstitusi Indonesia tidak mengharamkan adanya partai politik lokal, namun sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia belum memuat mekanisme untuk pembentukan partai politik lokal.

Pembahasan tentang partai politik lokal menjadi hal yang sangat menentukan apakah perundingan berhasil apa tidak. Disinilah kemampuan komunikasi politik dan pemanfaatan empati dan homofili sangat diperlukan. Penasehat politik GAM, Prof. Damien Kingsbury menyarankan agar pembahasan secara informal tentang partai politik lokal dibahas oleh Nur Djuli dan Sofyan Djalil. Kemudian Nur menjumpai Sofyan dikamarnya dan mengajaknya keluar untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka berbicara dengan menggunakan Bahasa Aceh sambil sedikit menyinggung tentang sentimen ke-Acehan mereka.

Hal tersebut ternyata memberikan hasil yang memuaskan. Sofyan Djalil langsung menghubungi Jusuf Kalla yang ada di Jakarta untuk mencari solusi terhadap masalah tersebut. Kemudian Jusuf Kalla menjawab dengan mengizinkan partai politik lokal berdiri di Aceh. Komunikasi politik yang terjadi justru sangat efektif apabila dilakukan dengan empati dan homofili. Hal ini tidak hanya sekedar efektif, bahkan bisa menyelesaikan masalah yang paling sulit dan dikhawatirkan dalam perundingan Helsinki.

Pada putaran kelima, perundingan sudah mencapai kemajuan yang sangat pesat. Hampi semua pembahasan sudah disetujui kedua belah pihak. Pembahasan poin-poin berikutnya terjadi dengan sangat lancar dan harmonis. Pada putaran ini pembahasan lebih menitikberatkan pada pengawasan dan implementasi butir-butir MoU yang telah disepakati. Bahkan pada perundingan ini dihadirkanlah Pieter Faith, yaitu perwakilan Uni Eropa yang akan mengawasi jalannya damai di Aceh. Komunikasi politi yang terjadi pada putaran ini tidak sering dilakukan antara GAM dan Indonesia.

Hari yang paling ditunggu-tunggu adalah penandatanganan MoU Helsinki oleh kedua belah pihak.

Penandatanganan tersebut dilakukan di Smolna, Helsinki. Disaksikan oleh media massa dari Indonesia dan internasional. Penandatanganan dilakukan oleh Hamid Awaludin yang mewakili pihak Indonesia dan Malik Mahmud yang mewakili pihak GAM. Sedangkan Marti Ahtisaari ikut menandatangani MoU sebagai fasilitator.

Banyak kebuntuan disaat perundingan justru diselesaikan diluar perundingan. Di sinilah menariknya komunikasi politik yang terjadi diluar meja perundingan. Sering sekali Ahtisaari memberikan isyarat kepada Menteri Awaludin dan Malik Mahmud dengan mengucapkan "*second floor*". Awaludin dan Malik segera menyusul Ahtisaari menuju ke lantai dua untuk mencari solusi tentang kebuntuan tersebut. Selain itu kebuntuan juga sering diselesaikan oleh Malik Mahmud, Hamid Awaluddin, Ahtisaari, dan Zaini Abdullah sambil berjalan mengitari halaman belakang gedung perundingan membicarakan solusi dari hati ke hati. Bahkan beberapa kali juga beberapa perunding mendiskusikan kebuntuan saat makan malam.

Inilah yang dimaksud dengan peneliti sebagai komunikasi politik yang fleksibel dan efektif. Dalam menyelesaikan konflik dan kepiawaian negosiasi, terkadang berbicara terlalu formal dan kaku tidak bisa menyelesaikan konflik. Momentum inilah yang dimanfaatkan kedua belah pihak untuk mencari solusi dan mengakhiri konflik yang terjadi antara GAM dan Indonesia. Empati dan homofili merupakan strategi utama yang digunakan dalam melakukan komunikasi politik informal tersebut. Kedua komunikator dan komunikan bisa lebih mengembangkan komunikasi dengan lebih terbuka.

Teori Empati yang dikemukakan oleh David Berlo menjelaskan bahwa dalam melakukan komunikasi politik, pihak yang berkomunikasi harus saling menempatkan diri pada kondisi lawan bicaranya. Sehingga terjalin sebuah hubungan yang akan menyukkseskan komunikasi. Dalam kaitanya dengan perundingan GAM dan RI. Kedua belah pihak juga melakukan empati tersebut. Empati diwujudkan kedua belah pihak, yaitu dalam melihat pentingnya penyelesaian konflik Aceh. Karena konflik Aceh sebenarnya

berimbas langsung kepada masyarakat. Kekerasan dan pembunuhan serta pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh disadari sebagai hal yang harus segera dihentikan dan diselesaikan.

Bencana alam tsunami yang meluluh-lantakkan sebagian Daerah Aceh menjadi perhatian yang cukup serius. Kedua belah pihak saling berempati terhadap bencana tersebut yang kemudian mendesak mereka untuk segera mencapai kesepakatan damai agar upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh bisa berjalan secepatnya.

Secara personal, empati sering kali diwujudkan dengan panggilan dan sapaan. Pihak Indonesia sering sekali memanggil Malik Mahmud dengan panggilan teungku. Teungku adalah panggilan kehormatan bagi Rakyat Aceh. Panggilan tersebut membuat seolah-olah Hamid Awaluddin menjadi orang Aceh yang menghormati Malik Mahmud dengan panggilan khas Aceh tersebut. Empati itu juga dirasakan oleh perunding-perunding lain. Bahkan obrolan-obrolan diluar meja perundingan sering sekali membahas tentang budaya dan lingkungan alam Aceh.

Pada perundingan Helsinki ini empati memiliki peranan yang sangat penting. Konflik yang terjadi selama lebih kurang 30 Tahun lamanya tentulah membuat sebuah jurang pemisah yang sangat lebar dan dalam. Namun empati mendekatkan kedua belah pihak. Sehingga tercipta sebuah kondisi komunikasi politik yang efektif hingga menghasilkan sebuah kesepakatan yang bermartabat bagi kedua belah pihak.

Teori berikutnya adalah homofili. Homofili adalah sebuah kesamaan yang dimiliki oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi politik. Dalam perundingan Helsinki, banyak sekali kesamaan yang terbangun. Kesamaan-kesamaan tersebut bahkan tidak hanya menentukan kondisi perundingan, namun mempengaruhi hasil perundingan.

Salah satu kesamaan yang paling terlihat adalah latar belakang atau suku masing-masing juru runding. Pada pihak Indonesia juru runding didominasi oleh Suku Bugis. Bugis dan Aceh memiliki catatan sejarah yang bagus dan harmonis. Secara karakter juga memiliki banyak kesamaan.

Kerasnya watak orang Aceh sama dengan kerasnya perawakan orang Bugis. Sehingga kedua belah pihak merasakan tidak ada perbedaan diantara mereka. Bahkan ketua delegasi GAM, Malik Mahmud memiliki kecintaan terhadap perahu khas daerah Bugis. Malik memiliki kenangan masa kecil dengan perahu bugis. Pembahasan tentang perahu Bugis ini sering dibicarakan diluar perundingan antara Malik Mahmud dan Hamid Awaluddin. Itu pula salah satu alasan yang mendekatkan kedua ketua delegasi tersebut.

Kekecewaan di pihak GAM terhadap terhadap Indonesia dimanifestasikan dalam bentuk kebencian GAM terhadap Etnis Jawa. Dalam komposisi juru runding RI sama sekali tidak ada seorangpun yang bersuku Jawa. Bahkan salah satu delegasi Indonesia ada orang asli Aceh yang berperan aktif saat perundingan, yaitu Sofyan Djalil. Hal ini semakin mendekatkan kedua belah pihak.

Salah satu kesamaan lain yang juga sangat berpengaruh ialah latar belakang organisasi. Salah seorang delegasi GAM, Zaini Abdullah adalah mantan pengurus Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara. Sedangkan Hamid Awaludin, Farid Husain, dan Sofyan Djalil dari delegasi Indonesia juga merupakan mantan aktivis HMI. Sehingga kedekatan mereka sebagai sama-sama mantan aktivis HMI sangat mudah dimunculkan.

Maka, komunikasi politik yang dilakukan melalui negosiasi pada perundingan Helsinki sangat dipengaruhi oleh empati dan homofili. Empati dan homofili adalah kunci keberhasilan dari komunikasi politik yang dibangun. Disamping itu juga, menciptakan dan meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak.

Ditandatanganinya MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 menunjukkan bahwasanya Aceh memasuki babak baru dalam perjalanannya, kali ini sebagai bagian dari Indonesia. Pada masa awal pasca perundingan, baik GAM maupun pihak Indonesia sama-sama berusaha keras merealisasi poin-poin yang telah disepakati dalam MoU Helsinki. Hal pertama yang dilakukan adalah membakukan MoU Helsinki menjadi sebuah produk hukum yang legal dalam sistem perundang-

undangan di Indonesia. Oleh karena itu, lahirlah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi dasar dijalankannya Pemerintah Aceh yang mengacu pada MoU Helsinki.

Kondisi masyarakat Aceh pasca damai mengalami perubahan yang pesat, kecuali kondisi impunitas yang mereka rasakan. Sejak terjadinya perang setelah dideklarasikannya GAM pada Tahun 1976 sampai hari ini tidak ada satu kasus pelanggaran HAM Aceh pun yang diselesaikan (Gabrillin, 2015). Sosiologis masyarakat jika ditinjau dalam pendekatan nasionalisme mengalami perubahan yang sangat menarik, terbentuknya tiga entitas nasionalisme di Aceh. Ketiga nasionalisme tersebut adalah nasionalisme ke-Acehan, nasionalisme Indonesia, dan nasionalisme Islam (Ishak, 2013).

Nasionalisme ini terbentuk berdasarkan dari historis dan proses sosial dalam kehidupan masyarakat serta hasil dari relasi antara kekuasaan, politik, dan konflik yang terjadi di Aceh. Menariknya, pasca konflik ketiga nasionalisme ini saling berkontestasi dalam mendorong atau menolak sebuah isu, atau sebaliknya, ketiganya saling mendukung (Ishak, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, negosiasi yang dilakukan antara GAM dan RI selama proses perundingan melalui enam tahapan, yaitu persiapan, kontak pertama, konfrontasi, konsiliasi, solusi dan pasca negosiasi. Komunikasi politik dengan menggunakan empati dan homofili, dilakukan dengan berhasil oleh kedua belah pihak untuk mencapai tujuan bersama, yaitu perdamaian. Hasil perundingan Helsinki adalah *win-win solution*, yaitu kedua belah pihak sama-sama puas terhadap hasil yang dicapai, dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan

REFERENSI

- Al-Chaidar. (1999). *Gerakan Aceh Merdeka*. Jakarta: Madani Press.
- Arifin, A. (2003). *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Berger, A. A. (2000). *Media And Communication Research Methods*. London: Sage Publication.
- Djumala, D. (2013). *Soft Power Untuk Aceh*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fisher, S. (2001). *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*. Jakarta: The British Council.
- Gabrillin, A. (2015, 8 14). *Peringati 10 Tahun Perjanjian Damai Aceh, Pemerintah Ditagih Selesaikan Kasus HAM*. Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2015/08/14/16362961/Peringati.10.Tahun.Perjanjian.Damai.Aceh.Pemerintah.Ditagih.Selesaikan.Kasus.HAM>
- Husain, F. (2007). *To See The Unseen*. Jakarta: Health and Hospital Indonesia.
- Ishak, O. S. (2013). *Aceh Pasca Konflik. Kontestasi 3 Varian Nasionalisme*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Kasiram. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Kountur, R. (2009). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan tesis*. Jakarta: Percetakan Buana Printing.
- Kriyantono, R. (2006). *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyana, D. (2000). *Ilmu Komunikasi, Pengantar*. Bandung: Remaja Rosadakarya.
- Rambe, K. (2015). Strategi Komunikasi Interpersonal Karyawan Unit Pelayanan PT. Jasa Raharja Cabang Aceh dengan Klaimen dari Daerah (Studi Klaimen dari Aceh Besar). *Skripsi*, 37.
- Situmorang, M. (2010). Perdamaian Aceh: Sebuah Pembelajaran. In B. S. Hadiwinata, L. Christanty, M. Situmorang, P. Prasetyo, S. Haq, & Y. P. Hermawan,

Transformasi Gerakan Aceh Merdeka. Dari Kotak Peluru Ke Kotak Suara (pp. 97-98). Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.

Suyanto, B. (2007). In B. Suyanto, & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif* (pp. 171-172). Jakarta: Kencana.